

**PERAN GENDER DALAM MASYARAKAT PAPUA: PENDIDIKAN KESETARAAN
GENDER YANG RESPONSIF TERHADAP BUDAYA LOKAL**

**Candra Aditya Bayu Permadi¹, Nasruddin², Jufia Basir³, Nur Rahmah Syahri Ramadhani⁴,
Anisa Hidayatun Ni'mah⁵, Sulis Maryati⁶**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Indonesia

candraadityabayupermedi@gmail.com, sahanasrul517@gmail.com, jufiabasir@gmail.com,
nurrahmahsyahri@gmail.com, anisahidayatun27@gmail.com, sulismaryati.papua@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kesetaraan gender yang responsif terhadap budaya lokal, khususnya di Papua. Fokus utama penelitian adalah peran pendidikan dalam mengatasi ketimpangan gender yang terjadi akibat sistem patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Papua. Ketimpangan gender di Papua masih menjadi persoalan serius, ditandai dengan stereotipe, subordinasi, kekerasan, serta beban kerja ganda yang dialami perempuan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka untuk menggali data dari jurnal, artikel, dan sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan membuka akses dan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan, terutama di wilayah Papua yang menghadapi tantangan geografis, budaya, dan ekonomi. Teori feminisme liberal yang menekankan kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan yang inklusif menjadi relevan untuk diterapkan di Papua. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan budaya dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender.

Kata kunci: kesetaraan gender, pendidikan, patriarki, budaya lokal, Papua, feminisme liberal

Abstract

This research aims to discuss gender equality that is responsive to local culture, especially in Papua. The main focus of the research is the role of education in overcoming gender inequality that occurs due to the patriarchal system that is deeply rooted in Papuan society. Gender inequality in Papua is still a serious problem, characterised by stereotypes, subordination, violence, and the double workload experienced by women. This research approach uses descriptive qualitative methods and literature studies to explore data from journals, articles, and other literature sources. The results show that education has an important role in improving gender equality by opening up equal access and opportunities for men and women, especially in the Papua region which faces geographical, cultural and economic challenges. Liberal feminism theory, which emphasises gender equality through inclusive law and policy reforms, is relevant to Papua. In addition, collaboration between the government, educational institutions and communities is needed to overcome cultural barriers and create an environment that supports gender equality.

Keywords: gender equality, education, patriarchy, local culture, Papua, liberal feminism

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Menurut WHO, gender merupakan perilaku, peran, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak untuk laki-laki dan perempuan. Gender mengacu pada peran dari kontribusi sosial, perilaku dan harapan yang dipelajari yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Eitzen menjelaskan bahwa terdapat penyebab dari timbulnya ketimpangan gender yaitu :

Pandangan dari teori materialistis menjabarkan bahwa ketimpangan gender sebagai outcome tentang bagaimana laki-laki dan perempuan terikat dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan pekerjaan domestik dan publik yang kemudian membuat perempuan lebih banyak beraktifitas dalam ranah domestik dan membuatnya terbatas dalam melakukan kegiatan di ranah publik.

Teori selanjutnya yaitu teori sosial-konflik yang diidentikkan dengan teori Marx. Karl Marx memberikan suatu gagasan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya bukan disebabkan oleh bentuk biologis yang berbeda, tapi menjadi bagian dari penindasan kelas yang memiliki kekuasaan dalam relasi produksi. Hubungan antara perempuan dan laki-laki menyerupai hubungan borjuis dan proletar, tuan dan hamba, atau bahkan hubungan antara pemeas dan yang diperas. Dimana dengan kata lain, yang menciptakan ketimpangan peran gender adalah konstruksi dari masyarakat. karena itulah sampai saat ini dalam indeks pembangunan gender masih memperlihatkan jarak antara laki-laki dan perempuan yang masih timpang. (Megawangi, 2005).

Berikutnya teori feminisme liberal yang memperlihatkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan selain fungsi biologis. Dalam teori ini menghendaki agar perempuan diikutsertakan dalam berbagai peran, termasuk dalam ranah publik, sehingga kelompok jenis kelamin tidak lagi yang dominan. (Megawangi, 2005)

Perbedaan peran dan perilaku yang muncul dan berkembang dalam masyarakat disebut sebagai gender. Melalui proses yang berkaitan dengan sosialisasi perempuan dan laki-laki, masyarakat membentuk peran dan perilaku tersebut. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sering dianggap sebagai prasyarat perilaku sosial, yaitu kemampuan beradaptasi lingkungan. Akan tetapi hal tersebut justru menjadi pendiskriminasian terhadap perempuan.

Gender menjadi persoalan umum yang kerap dijumpai di berbagai belahan dunia karena seringkali belum mencapai tingkat kesetaraan, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak asasi mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara mereka disebut sebagai kesetaraan gender. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dan adil terhadap keuntungan pembangunan dan tidak ada diskriminasi di antara mereka, maka kesetaraan gender telah tercapai.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi ketidaksetaraan gender bagi kaum perempuan. Terdapat beberapa problematik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi kaum perempuan di pendidikan formal agar dapat bersaing dengan kaum laki-laki, timpangnya implementasi kesetaraan gender di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Papua Barat yang wilayah pemerintahannya sebagian besar terdiri dari daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan akses transportasi dan informasi karena kondisi geografis Papua Barat. Dari perspektif relasi gender di Papua Barat, situasi sosial perempuan Papua masih perlu didiskusikan. Tinjauan tentang konteks budaya dan sosial seputar perempuan dengan demikian memahami dan memperjelas konteks dinamis dari gerakan perempuan dan perjuangan gender yang sedang berlangsung (Pugu, Lumentut, and Pelamonia 2022).

Banyak peneliti sebelumnya telah menyelidiki isu gender di wilayah Papua dan Papua Barat. Akan tetapi belum mendapatkan pencerahan atau jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan tentang kesetaraan gender di Papua.

Menurut (Melyana R. Pugu dkk) menemukan bahwa otonomi khusus Papua, yang mengatur kesejahteraan orang asli Papua, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, tidak efektif karena gagal melindungi dan memihak kelompok-kelompok ini di tanah air Papua. Namun semua upaya yang telah dilakukan tidak menutup kemungkinan bahwa kesetaraan gender di Papua akan terus menerus seperti itu (pendiskriminasian) setiap usaha yang dilakukan pasti akan memiliki hasilnya tersendiri.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif studi pustaka. Penulis menggunakan beberapa referensi dalam meneliti tentang penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal maupun web. Dalam studi pustaka, terdapat langkah-langkah dalam pengumpulan data. Menurut Amruddin (2022), Studi pustaka ialah sebuah proses pengumpulan data dari berbagai macam literatur, hasil penelitian, maupun studi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Studi pustaka sendiri dianalogikan sebagai sebuah kunci yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Menurut Zed dalam Putri (2019), terdapat langkah-langkah dalam melakukan penelitian kepustakaan, meliputi 1) menyiapkan alat perlengkapan; 2) menyusun bibliografi kerja; 3) mengatur waktu; 4) membaca dan membuat catatan penelitian. Karya ilmiah seperti buku, artikel, jurnal, maupun web.

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN

Relasi antara laki-laki dan perempuan tidak lepas dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Papua. Gambaran tentang kerentanan perempuan Papua terhadap sistem sosial patriarki menyebabkan perempuan Papua memperkuat kemauan dan kekuatannya untuk melepaskan diri dari sistem tersebut. Isu perempuan masih dipengaruhi oleh budaya yang sangat patriarki. Budaya patriarki adalah nilai yang diyakini mewakili struktur umum di mana laki-laki berkuasa atas perempuan. (Napikoski, 2020).

Budaya patriarki ini tercermin dalam banyak aspek, baik ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum sehingga menjadi perhatian secara internasional. Ketidakadilan gender ini menyebabkan setiap orang khususnya perempuan, mengalami keterpurukan hidup, membatasi kebebasan perempuan dalam berbagai bidang dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan. Perjuangan perempuan Papua kemudian dilakukan agar memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan perempuan, hak asasi manusia yang terkait dengan hak hidup, hak berpartisipasi dalam politik, hak berpendapat, hak kebebasan berekspresi dan banyak hak asasi manusia lainnya untuk menciptakan kesetaraan gender bagi Papua.

Isu gender terkait dengan ketidaksetaraan gender yang masih ada di Papua antara lain kekerasan terhadap perempuan Papua, stereotipe, subordinasi, dan beban kerja yang berlipat ganda. Pengalaman kekerasan perempuan Papua terkait erat dengan konflik tenurial yang berkepanjangan di Tanah Papua. Semua lapisan masyarakat Papua terkena dampak langsung dari naik turunnya konflik, terutama para korban yang berjenis kelamin perempuan. Paparan komunitas terhadap kekerasan membantu mereka untuk lebih memahami masalah yang mereka hadapi dan membuat mereka lebih tangguh untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya.

Itulah mengapa artikel ini akan menjelaskan tentang peran pendidikan terhadap kesetaraan gender di Papua. Pendidikan merupakan investasi untuk individu. Jika pendidikan yang ditempuh semakin tinggi maka kesejahteraan dari individu tersebut akan semakin meningkat dan hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. (Mankiw, 2007).

Pendidikan pada dasarnya memiliki peran penting dalam membuat manusia dapat menyerap teknologi modern serta mengembangkan kapasitas manusia sehingga tercipta

pertumbuhan dan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Menurut Todaro, pendidikan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut berupa kualitas angkatan kerja akan meningkat melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan, memberikan kesempatan besar bagi pekerja dalam menyerap berbagai informasi secara cepat, dianggap mampu menghilangkan berbagai hambatan sosial dan kelembagaan. (M.P Todaro & Smith, 2006).

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan isu penting dalam kemajuan manusia yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Langkah-langkah proaktif dalam bentuk undang-undang, program, dan inisiatif untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih ada di sejumlah bidang, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, harus dilakukan secara proaktif.

Pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan kesetaraan gender agar antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai pribadi yang setara sesuai pendidikannya. Sumberdaya Manusia yang berkualitas dapat dibentuk dan diwujudkan melalui pendidikan keluarga yang bukan hanya sebagai *Informal Learning*, akan tetapi juga sebagai sarana *Family Life Education*, dari keluarga membangun dunia. (Rahmi 2020).

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan bermacam-macam ketidakadilan. Pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan gender mulai direalisasikan secara perlahan-lahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesetaraan kesempatan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Namun, hal ini tentunya belum terjadi secara merata, ketidakadilan masih berdiri tegak. Banyak kaum perempuan yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu yang belum bisa merasakan kesetaraan dalam bidang pendidikan, dan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan mengindikasikan bahwa bias gender masih belum dapat dihilangkan dari kultur masyarakat Indonesia terkhususnya di Papua. (Sulistyowati 2020)

Menghilangkan ketidaksetaraan gender memerlukan strategi dan berbagai program yang menciptakan kesetaraan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi persoalan kesetaraan gender di Papua sangat sulit untuk direalisasikan.

Kesenjangan yang terjadi dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, serta budaya membuat kaum perempuan tidak mampu berkembang dan mengembangkan diri untuk menunjukkan aktualisasi diri mereka. Ketidaksetaraan gender terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor yang pada dasarnya berasal dari pemikiran yang ortodok dan parsial. (Natasha 2013)

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sedemikian rupa sehingga tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, pengucilan dan kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi dan tata kelola pembangunan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan adil (Kemenpppa 1995).

Namun di Papua ini kesenjangan terhadap kesetaraan gender masih sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, di mana perempuan tidak semua mengemban pendidikan dengan baik bahkan banyak yang berhenti di tangan-tengah perjalanan dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki lebih diutamakan untuk berpendidikan sebab laki-laki yang akan memimpin sebuah keluarga rumah tangga dengan berbagai lisensi dan legalitas agar keluarga tersebut dapat dipandang baik oleh masyarakat.

Upaya penerapan kesetaraan gender dalam masyarakat dan kehidupan bernegara harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar kesetaraan gender tersebut dapat

tercapai secara perlahan-lahan dan terus meningkat seiring berjalannya waktu atas upaya dan usaha yang dilakukan.

Diskriminasi gender masih menjadi isu di masyarakat Indonesia saat ini, khususnya di pedesaan di mana feminisme belum memberikan dampak yang signifikan. Status perempuan jauh lebih lemah dalam sejarah dan budaya daripada dalam adat atau undang-undang. Dalam konteks adat, perusakan hak seringkali berdampak pada distribusi warisan, status keluarga, dan kemandirian pangan dan energi yang tidak adil. Kepemilikan properti oleh negara yang masih terang-terangan tidak diatur, penindasan atas ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang pendidikan, eksploitasi dan perampasan hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas dan perempuan pribumi akibat pengaturan kebijakan global, nasional, lokal, dan masyarakat yang seringkali bias dan masih sangat diskriminatif hanyalah beberapa contoh saja. Ini juga menjelaskan mengapa perempuan sering diperlakukan tidak adil dalam keluarga, yang juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga bersumber dari keluarga yang merupakan individu terdekat. Rantai ketidaksetaraan gender bagi perempuan semakin diperkuat dengan perlakuan kejam yang dialami perempuan pada tingkat fisik dan mental.

Dibanyak tempat, budaya patriarki telah lama membelenggu perempuan yang akhirnya membuat perempuan tidak bisa menjadi seperti yang mereka inginkan. Justru perempuan dipaksa dan dibentuk agar menjadi "perempuan" yang sesuai dengan fitrah budaya sosial. Mengenai tanggung jawab pekerjaan rumah, pembagian tugas masih terbatas pada sifat gender yang melekat. Seperti misalnya pekerjaan domestik seperti mencuci piring, memasak, mencuci baju, mengasuh anak serta mengepel lantai dsb, memang sudah dijadikan sebagai tanggung jawab seorang perempuan. Sedangkan laki-laki bertugas membenahi keran, memotong rumput, atau memperbaiki atap rumah yang bocor serta mengurus ternak. Padahal seharusnya pekerjaan rumah bukan dibagi berdasar sifat gender tetapi kemampuan dari individu tersebut.

Misalnya juga pada lingkup organisasi, laki-laki diidentikkan dengan sosok pemimpin sedang perempuan seringkali ditempatkan pada posisi seperti bendahara ataupun sekretaris. Alhasil dominasi laki-laki dalam lingkup organisasi lebih besar ketimbang perempuan, meskipun tak semua organisasi seperti ini. Namun terkadang dalam memilih pemimpin perempuan, gambaran sifat perempuan seperti emosional dipertimbangkan untuk dijadikan pemimpin. Meskipun dalam dunia pendidikan perempuan sudah bisa bersekolah hingga jenjang yang tinggi, tak hayal membuat kehidupan perempuan menjadi lebih "tenang". Maksudnya adalah perempuan akan disibukkan dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan yang bersifat tidak mendukung oleh orang disekitarnya. Belum lagi bila bertemu dengan tindak pelecehan seksual yang malah menyalahkan pakaian yang dikenakan oleh perempuan.

Berbeda dengan Sulawesi Utara, di daerah ini kesetaraan gender justru sudah lama tercipta, bahkan posisi perempuan terlihat lebih didahulukan karena perempuan dianggap pencipta manusia baru. Sekat yang diciptakan budaya patriarki yang membuat perbedaan ruang kerja dalam rumah tangga justru tak dikenal di daerah ini. Pasalnya baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi juru masak dan memiliki kesetaraan di wilayah dapur. Hingga akhirnya hal ini menjalar ke aspek lain dalam kehidupan masyarakat (Akbar, 2021).

Perbandingan perbedaan tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan gender sebenarnya bisa terealisasikan pemikiran yang memiliki dasar bahwa segala sesuatu dapat dikerjakan sesuai kemampuan individu dan keahlian masing-masing individu tanpa memandang gender, kecuali pekerjaan yang bersifat fitrah sesuai takdir yang telah ditentukan sesuai gendernya masing-masing.

Teori Feminisme Liberal pertama kali lahir pada abad ke-18 dan dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft. Teori ini kemudian dianggap relevan karena ada penekanan dimana konsep liberal

yang mengacu pada hak asasi manusia dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga, teori ini menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan dapat memperoleh kesempatan yang sama. Feminisme Liberal berfokus pada perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender melalui reformasi hukum yang lebih menguntungkan perempuan dan kebijakan yang inklusif, seperti peraturan undang-undang yang menghapuskan diskriminasi gender dan melindungi hak-hak perempuan. (Susanto, 2013).

Teori ini berangkat dari adanya budaya patriarki yang mengarah pada pekerjaan perempuan. Di mana pada masyarakat luas perempuan selalu ditempatkan pada sifat feminime. Hal ini kemudian mendorong kaum Feminisme Liberal untuk mendobrak argumentasi-argumentasi serta stigma patriarki yang telah dibangun pada lingkungan masyarakat luas. Feminisme Liberal menginginkan adanya kebebasan bagi perempuan dari peranan gender yang bersifat menindas. Teori ini juga telah menjelaskan bahwa kaum perempuan harus melakukan pergerakan untuk dapat melewati keterbatasan yang ada dalam dirinya. Dengan artian, perempuan mampu untuk mengubah pola pikir masyarakat pada sektor publik, struktur institusi, dan mampu memikul beban keluarga pada aspek ekonomi (Nugroho 2011, 66).

Teori Feminisme Liberal melihat kesempatan bagi perempuan dalam aspek ekonomi sangat besar. Kesempatan yang dimaksud yaitu memiliki pekerjaan atau bahkan setara dengan laki-laki, sehingga perempuan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada laki-laki. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara perempuan dapat bersaing dalam dunia kerja. Untuk itu, teori ini sangat mendukung pengarusutamaan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, serta memberikan kesempatan yang setara dan adil untuk kaum perempuan lebih luas mengakses sumber daya.

SIMPULAN

Kesetaraan gender di Papua masih terjadi kepatriarkian yang menjadi penghambat perempuan untuk menjadi individu yang terpadang. Pendidikan menjadi salah satu alasan peingkatan kesetaraan gender dengan cara meningkatkan kualitas individu tersebut, entah laki-laki ataupun perempuan. Pendidikan pada dasarnya memiliki peran penting dalam membuat manusia dapat menyerap teknologi modern serta mengembangkan kapasitas manusia sehingga tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Dengan adanya teori feminisme, maka kesetaraan gender di Papua ini dapat terealisasikan meskipun mengalami hambatan yang sangat serius terlebih masyarakat Papua masih sangat kental dan kuat terhadap budayanya yang dipercaya memang masih menjadi panutan turn temurun. Dengan upaya dan Kerjasama dengan berbagai Lembaga pendidikan dan pemerintahan mungkin akan lebih mempermudah tercapainya kesetaraan gender di Papua terlebih peran pendidikan terhadap kesetaraan gender.

REFERENSI

- Megawangi, R. (2005). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Pugu, Melyana R, Dhea T Lumentut, and Yan G Pelamonia. 2022. "Perempuan Pedesaan Dan Disabilitas Di Provinsi Papua Dan Papua Barat (Suatu Analisa Hubungan Internasional Dalam Pelaksanaan Otsus Papua)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(4):1-19. (Diakses 2024) <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6653>
- Napikoski, Linda. 2020. "Masyarakat Patriarkal Menurut Feminisme." 2020. <https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition3528978>. Diakses 2024.

- Amruddin, et all. (2022) Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Media Sains Indonesia. Diakses dari: https://www.academia.edu/download/106339608/Buku_Digital_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_dan_Kualitatif.pdf#page=16
- Putri, A.E. (2019) Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, 4(2), 39-42. DOI: <https://www.academia.edu/download/97741709/pdf.pdf>
- Mankiw, N. G. (2007). Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Rahmi, Alendra Yusiyaka dan Ani Safitri. (2020). Pendidikan Keluarga Responsif Gender. Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 3, No. 1, April 2020, hlm.232-242. Pendidikan Masyarakat, Universitas Ibn Khaldun.
- Natasha, Harum. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak dan Solusi. Marwah. Vol. XII. No. 1. Juni Th. 2013.
- Nugroho, Riant. (2011). Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, Dwi. (2013). Kajian Kritis Tentang Akar Teologi Dan Ideologi Feminisme Amina Wadud Muhsin). Kediri: IAIN Kediri. (Diakses 2025) <http://etheses.iainkediri.ac.id/578/>
- Sulistyowati, Yani. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies. Volume 1 No. 2 Tahun 2020. IAIN Ponorogo.
- Akbar, Satria Y. 2021. Perempuan dan Seniman Perempuan Sulawesi Utara. (Diakses, 2025) <https://koalisiseni.or.id/perempuandan-seniman-perempuan-sulawesiutara/>
- International Labour Organization. 2020. "Spotlight on Work Statistics" https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/publication/wcms_757960.pdf. Diakses 2024.
- Kemenpppa. 1995. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pendahuluan." Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, xviii + 178.